



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN CIANJUR)**

Skripsi

Dibuat oleh:

Alvira Nur Fahirah
0221 17 183
nurfahirahlvira@gmail.com

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2021



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021

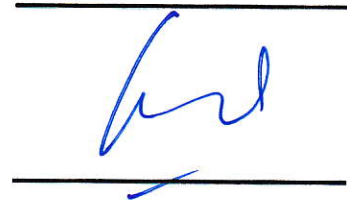
Alvira Nur Fahirah
0221 17 183

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Drs. Monāng Situmorang, Ak., M.M., CA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFr. A.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Amelia Rahmi, S.E., M.Ak.)



Nama : Alvira Nur Fahirah
NPM : 0221 17 183
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 13 Juli 2021

METERAI Rp6000,-

Alvira Nur Fahirah
0221 17 183

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ALVIRA NUR FAHIRAH. 022117183. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur). Di bawah bimbingan : BUDIMAN SLAMET dan AMELIA RAHMI. 2021.

Kualitas laporan keuangan daerah adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu pemerintah daerah dimana didalamnya memiliki informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dengan menyebarkan kuesioner melalui *link google form* kepada 78 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25, metode statistik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda serta uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kualitas laporan keuangan daerah

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak atas bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga serta bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Dr. Chaidir, S.E., M.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Agung Fajar Ilmiyono, S.E, M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFr. A. Selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Amelia Rahmi, S.E., M.Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas E Akuntansi 2017 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan, dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.

12. Kepada teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Keuangan 2017 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, motivasi dan banyak kata yang tak bisa penulis utarakan melalui kalimat ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Juli 2021

Penulis,

Alvira Nur Fahirah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PENYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	iii
LEMBAR PENYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.2.1 Definisi Sistem Akuntansi	8
2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8
2.2.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8
2.2.4 Mekanisme Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	9
2.2.5 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	10
2.2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.2.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan.....	11
2.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah	13
2.3.1 Definisi Laporan Keuangan	13
2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan.....	13
2.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	14

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	16
2.4.1 Penelitian Sebelumnya.....	16
2.4.2 Kerangka Pemikiran	19
2.4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	19
2.4.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	20
2.4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	20
2.5 Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
3.4 Operasionalisasi Variabel	23
3.5 Metode Penarikan Sampel	25
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	26
3.7.1 Uji Kualitas Data	26
3.7.1.1 Uji Validitas	26
3.7.1.2 Uji Reliabilitas.....	27
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	27
3.7.3.1 Uji Normalitas	27
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas	28
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	28
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	28
3.7.5 Uji Hipotesis	29
3.7.5.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	29
3.7.5.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	29
3.7.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	31
4.1.2 Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	32
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	46
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden	46
4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	48
4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah	49

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah	51
4.3 Analisis Data	53
4.3.1 Uji Kualitas Data	53
4.3.1.1 Hasil Uji Validitas	53
4.3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas	55
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas	56
4.3.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	57
4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.3.4 Uji Hipotesis	59
4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	59
4.3.4.2 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	60
4.3.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	62
4.4.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	62
4.4.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	63
4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Opini BPK Untuk LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2019	3
Tabel 2.1	: Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 3.1	: Operasionalisasi Variabel.....	23
Tabel 4.1	: Data Pengumpulan Kuesioner Responden	46
Tabel 4.2	: Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	46
Tabel 4.3	: Distribusi Frekuensi Jabatan Responden.....	47
Tabel 4.4	: Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden.....	47
Tabel 4.5	: Distribusi Jawaban Responden Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	48
Tabel 4.6	: Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	50
Tabel 4.7	: Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	52
Tabel 4.8	: Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	54
Tabel 4.9	: Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	54
Tabel 4.10	: Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	55
Tabel 4.11	: Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.12	: Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.13	: Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.14	: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	59
Tabel 4.15	: Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	60
Tabel 4.16	: Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	61
Tabel 4.17	: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
Tabel 4.18	: Ringkasan Hasil Penelitian.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1	: Diagram Scatterplot.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Riset/Magang	71
Lampiran 2	: Surat Rekomendasi Praktik Kerja	72
Lampiran 3	: Surat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	73
Lampiran 4	: Operasionalisasi Variabel.....	74
Lampiran 5	: Kuesioner Penelitian.....	77
Lampiran 6	: Jawaban Pernyataan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	82
Lampiran 7	: Jawaban Pernyataan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1).....	84
Lampiran 8	: Jawaban Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).....	86
Lampiran 9	: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	88
Lampiran 10	: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal (Defitri, 2018).

Agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah yaitu dengan diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi merupakan bentuk pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan manajerial terhadap urusan di daerahnya yang dapat pula menyangkut pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah (Pratama, 2015 dalam Lutfiyanti, 2018).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* (Defitri, 2014 dalam Defitri 2018), untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah (Defitri et al., 2016 dalam Defitri, 2018).

Lutfiyanti (2018) menyatakan bahwa “Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.” Patra et al., 2015 dalam Lutfiyanti (2018) menyatakan bahwa “Laporan keuangan bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaporan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu

dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta terbebas dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan dinilai berupa Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Opini Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena yang terjadi tentang Kualitas Laporan Keuangan yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan lainnya. Hal ini seperti diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 BPK. Dari 13.567 masalah itu meliputi meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar. Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.051 (60%) sebesar Rp8,28 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

1. Kerugian sebanyak 2.693 (66%) permasalahan sebesar Rp1,79 triliun.
2. Potensi kerugian sebanyak 433 (11%) permasalahan sebesar Rp3,30 triliun.
3. Kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23%) permasalahan sebesar Rp3,19 triliun.

Selain itu, terdapat 2.651 (40%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar, terdapat 39 (25%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,17 miliar, 1 (1%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp426,51 miliar, dan 112 (74%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp43,37 miliar.

Adapun Fenomena lain yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan daerah yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini WTP (82%), 86 opini WDP (16%), dan 13 opini TMP (2%). Dibandingkan tahun 2017, LKPD yang mendapatkan opini WTP mengalami kenaikan opini WTP pada tahun 2018. Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun 2018.

Hasil pemeriksaan atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, menunjukkan bahwa 485 LKPD memperoleh opini WTP, 50 LKPD memperoleh opini WDP, dan 6 LKPD memperoleh opini TMP/*Disclaimer Opinion*.

LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan tahun 2018 yang hanya 443 LKPD menjadi 485 LKPD. Fenomena lain tentang kualitas laporan keuangan daerah yaitu, setelah pada tahun 2018 mendapatkan hasil pelaporan WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Cianjur untuk pelaporan anggaran tahun 2019 meningkat menjadi penilaian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Cianjur tahun 2015-2019 :

Tabel 1.1

Daftar Opini BPK untuk LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Kabupaten Cianjur
1.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2018	Wajar Dengan Pengecualian
5.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : LHP LKPD Kabupaten Cianjur 2015-2019, IHPS www.bpk.go.id

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Cianjur pada 2015-2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada tahun 2018 mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2019 mendapatkan kenaikan opini kembali menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan opini tersebut disebabkan karena beban hibah untuk sarana dan prasarana SMP swasta tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

Fenomena yang terjadi tentang pengelolaan keuangan, yaitu:

CIANJUR – Kabupaten Cianjur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut diberikan berkaitan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu diketahui jika hanya ada tiga daerah yang mengapatkan WDP untuk LKPD tahun anggaran 2018, salah satunya ialah Kabupaten Cianjur. Sementara itu, 24 daerah lainnya mendapatkan opini WTP. Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, diraihnya opini WDP memang tidak terlalu baik untuk Cianjur, padahal sejak empat tahun terakhir Tatar Santri terus mendapatkan opini WTP. “Tapi ini jadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pemerintahan kaitan pengelolaan keuangan, supaya di tahun berikutnya bisa WTP kembali,” kata dia saat ditemui di RSUD Sayang Cianjur, Senin (10/6). Menurutnya, tidak teraihnya kembali WTP memang berkaitan dengan OTT Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2018. Oleh karena itu BPK tidak bisa mentolelir penyimpangan yang terjadi sehingga memberikan opini WDP.

(<https://www.cianjurekspres.net/cianjur-hanya-dapat-wdp/>)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik dikarenakan hasil dari kinerja pemerintahan yang di periksa oleh BPK masih mengalami beberapa catatan yang kurang baik serta masih mengalami kenaikan dan penurunan opini yang belum stabil. Laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu perlu adanya suatu sistem yang dapat menjadi landasan bagi entitas dalam menjalankan kegiatannya. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah, yang merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ratifah dan Ridwan, 2012 dalam Lutfiyanti, 2018). Lutfiyanti (2018) menyatakan bahwa “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai suatu pedoman yang diterapkan dalam proses kegiatan keuangan di pemerintahaan diharapkan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Dari dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari kualitas yang dihasilkan, indikator yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah oleh karena itu berpengaruh pada Pengelolaan Keuangan Daerah yang seharusnya ditunjang dengan Sistem Akuntansi Keuangan yang baik.

Berkaitan dengan fenomena dan uraian di atas, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah telah dilakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Annisa Rizky Lutfiiyanti (2018) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang)”. Hasil penelitian tersebut adalah diketahui bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dari fenomena dan penelitian yang telah dipaparkan bahwa ada keterkaitan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dari penelitian sebelumnya di salah satu pemerintah daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur. Alasan pemilihan tempat yaitu karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan opini pada tahun 2019 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu peneliti ingin mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memenuhi indikator dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Adanya kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang ada pada pemerintahan berakibat pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Efektifitas dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada pada pemerintahan apakah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terkait.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai identifikasi masalah, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta berbagai informasi yang dihasilkan dari analisis keterkaitan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga dapat mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan bagi pihak yang memerlukan sehingga maksud dan tujuan yang ingin dicapai terwujud dan bernilai lebih. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan kepada BPKAD Kabupaten Cianjur dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan sistem akuntansi keuangan yang berlaku dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi keuangan pada khususnya dalam membantu pengambilan keputusan melalui informasi pada laporan keuangan yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010).

Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009) Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara serta menyediakan informasi baik bagi pemerintah maupun publik.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2009) :

1. Pengendalian Manajemen (*Management Control*)

Terkait dengan pengendalian manajemen, akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terkait dengan akuntabilitas, akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan secara tepat dan efektif serta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Informasi ini juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.1 Definisi Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen komputer atau komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi (Gelinias, Sutton and Hunton, 2016).

Mulyadi (2016) menyatakan bahwa “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi keuangan bagi manajemen atau pengguna informasi akuntansi untuk memudahkan pengelolaan perusahaan.

2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012 dalam Mokoginta et al., 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Erlina dan Rasdianto, 2013 dalam Lutfiyanti, 2018).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang meliputi proses identifikasi, pencatatan, pengukuran dan pelaporan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan pihak-pihak tertentu.

2.2.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset, dan disempurnakan oleh permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut (Halim, 2012 dalam Mokoginta et al., 2017) :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.2.4 Mekanisme Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa “Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan.” Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah diatas diuraikan sebagai berikut (Lutfiyanti, 2018) :

1. Pencatatan

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- b. Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- c. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- d. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- e. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

- a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi paling up to date.
- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akun nol.
- e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- g. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya antara lain : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat.

2.2.5 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat 2 dan 3, sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusutan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

2. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat (Defitri, 2018).

2.2.7 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi (Sholeh, 2010 dalam Defitri, 2018) :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Value for money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai (Defitri, 2018).

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.”

Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan, atau investasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordawan et al., 2012 dalam Lutfiyanti, 2018).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu perusahaan.

2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dapat dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap formasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas ada kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu :

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang selanjutnya seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda jauh.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Risdhayanti Nur Sholikah et al., 2016. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali)	Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji F, Koefisien Determinasi	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
2.	Lia Hanifa et al., 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Pengelola Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Berganda dengan SPSS Versi 22	Berdasarkan hasil penelitian, Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3.	Gusrya Indria Sari dan Fadli, 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan <i>Good Governance</i> , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Analisis Statistik Deskriptif, PLS <i>Algorithm</i> , Uji Hipotesis	Berdasarkan pada hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. San Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.	Kartika Dwi Indrayani dan Harjanti Widiastuti, 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> dengan SPSS 15	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Tulus Harefa, 2014. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Deskriptif, Analisis Verifikatif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas	<i>The results showed that the area of financial accounting system with the positive direction of the high impact on the quality of financial reporting and accounting standards were influential government with the positive direction of the quality of financial reporting at the Revenue Service and Financial Management in the Regency of Bandung.</i>
6.	Lilis Setyowati et al., 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Peran Teknologi Informasi (TI), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (3) peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

7.	Nyoman Ari Surya Darmawan et al., 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik Yang Digunakan Adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Dan Uji Heteroskedastisitas, Sedangkan Pengujian Hipotesis Dengan Analisis Regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	Annisa Rizky Lutfiyanti, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Deskriptif, Analisis Verifikatif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi, Korelasi, Pengujian Hipotesis Serta Analisis Koefisien Determinasi dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 25.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan secara simultan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 54,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,4% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya Pemanfaatan teknologi informasi, Good Government Governance, Kompetensi SDM.

9.	Siska Yulia Defitri, 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.
----	---	--	----------------------------------	--

Sumber : Data Sekunder (2020)

2.4.2 Kerangka Pemikiran

2.4.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam berbagai hal. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009 dalam Lutfiyanti, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanti (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) dengan variabel yang sama membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikah et al, (2016) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Hanifa et al., (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harefa (2014) juga membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan oleh Darmawan et al., (2014) hasil dari penelitian tersebut juga membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Widiastuti (2020) menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel (Mardiasmo, 2002 dalam Darmawan et al., 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah et al., (2016) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2014) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4.2.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

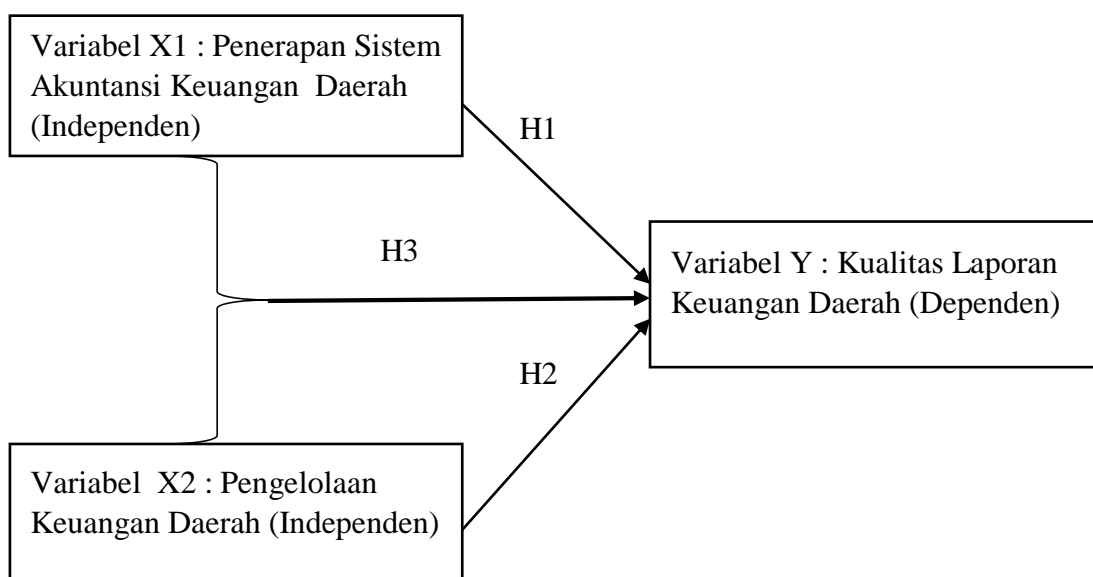
Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana (Defitri, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Darmawan et al., (2014) dengan variabel independen yang sama yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian lain terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan berbagai variabel independen yang berbeda di masing-masing penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fadli (2017) serta

penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al., (2016) menyatakan bahwa variabel independen yang digunakan pada masing-masing penelitian berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Widiastuti (2020) menyatakan bahwa semua variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah kecuali variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian tersebut yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dikarenakan masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir di atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H2 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu merupakan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur yang berlokasi di Jl. KH Abdullah Bin Nuh No. 15 Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya media perantara. Data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi jawaban dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dalam format *link google form* untuk diisi oleh pegawai BPKAD Kabupaten Cianjur dengan menggunakan Skala Likert.

3.4 Operasional Variabel

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable-variabel tersebut. Definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan dalam operasionalisasi dari sudut penelitian.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner	Sumber Referensi
1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum.	Ordinal	1	2 dan 5
			Pencatatan yang digunakan efektif.	Ordinal	2	
			Relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada.	Ordinal	3	
			Dilaksanakan tanpa kesalahan atau penyimpangan.	Ordinal	4	
			Menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.	Ordinal	5	
		Penggolongan dan Pengikhtisaran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Dilakukan identifikasi/pengklasifikasian.	Ordinal	6	2 dan 5
			Penjurnalan dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.	Ordinal	7	
			Pengklasifikasian transaksi dilaksanakan secara tepat dan benar.	Ordinal	8	
		Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.	Ordinal	9	2 dan 5
			Buku laporan yang dibuat sesuai prosedur yang berlaku.	Ordinal	10	
			Buku laporan yang dibuat telah relevan.	Ordinal	11	
			Dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.	Ordinal	12	
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.	Ordinal	1	4 dan 5
			Keputusan pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.	Ordinal	2	
		<i>Value for money</i> Pengelolaan	Pengelola keuangan dilaksanakan sesuai standar.	Ordinal	3	4 dan 5

		Keuangan Daerah	Dioperasionalkan secara ekonomis, efektif dan efisien.	Ordinal	4			
		Kejujuran dalam mengelola keuangan publik	Memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja.	Ordinal	5	4 dan 5		
			Jujur dan dapat dipercaya.	Ordinal	6			
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbuka dalam pengelolaan keuangan.	Ordinal	7	4 dan 5		
			Responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.	Ordinal	8			
		Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah	Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan.	Ordinal	9	4 dan 5		
			Setiap evaluasi kinerja ditindaklanjuti.	Ordinal	10			
		3.	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Relevan	Dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.	Ordinal	1	1, 3, dan 5
					Mampu memprediksi masa yang akan datang.	Ordinal	2	
					Penerbitan laporan keuangan tepat waktu.	Ordinal	3	
					Mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.	Ordinal	4	
Andal	Menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya.			Ordinal	5	1, 3, dan 5		
	Mewujudkan simpulan yang berbeda.			Ordinal	6			
	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.			Ordinal	7			
Dapat Dibandingkan	Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.			Ordinal	8	1, 3, dan 5		
	Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.			Ordinal	9			
Dapat Dipahami	Informasi dapat dipahami dengan jelas.			Ordinal	10	1, 3, dan 5		
	Disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna.			Ordinal	11			

Sumber Referensi :

1. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2010
2. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2019
3. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah, tahun 2013
4. Chabib, S., *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung*. Bandung: Fokus Media, tahun 2010
5. Siska Yulia Defitri, *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2018)*

3.5 Metode Penarikan Sampel

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Teknik sampling adalah merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.”

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang akan penulis gunakan yaitu didasarkan pada metode *non probability sampling*, yaitu suatu teknik dalam pengambilan sampel yang tidak dapat memberikan suatu peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu, sehingga semua populasi yang memenuhi karakteristik yang ditentukan akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan aset daerah, dan bidang anggaran, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pegawai yang bekerja merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Teknik pengukuran untuk mengolah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif yaitu menggunakan *Summated Rating Method: Likert Scale* atau Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu data penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka

peneliti akan memperoleh data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkannya (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan metode pengukuran di atas, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden dengan menggunakan *link google form*.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.”

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Analisis Statistika Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas. Sedangkan, Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t), Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji F), dan Koefisien Determinasi (R^2).

3.7.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dari penelitian ditentukan oleh instrumen-instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data agar dapat menghasilkan data yang berlaku. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas ini yaitu dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid yaitu apabila pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner yang berkaitan.

Kriteria dalam pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan atau pernyataan adalah nilai dari Corrected Item Total Correlation atau nilai dari r hitung harus berada di atas nilai r tabel. Apabila nilai dari r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item dari pertanyaan atau pernyataan yang lain daripada dengan variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Secara singkat nya adalah sebagai berikut:

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

Apabila suatu alat ukur sudah dikatakan valid, maka untuk selanjutnya dapat dilanjutkan untuk melakukan pengujian reliabilitas. Untuk sebaliknya apabila alat ukur dinyatakan tidak valid, maka alat ukur yang sebelumnya harus dievaluasi atau harus diganti dengan alat ukur yang lebih tepat.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu merupakan indeks dalam mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang memberikan suatu hasil yang konsisten. Apabila semakin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka akan semakin reliabel alat pengukur. Besar kecilnya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indeks korelasi.

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Jika Cronbach's Alpha ≥ 0.60 maka alat ukur bersifat reliabel.

Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka alat ukur bersifat tidak reliabel.

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistika Deskriptif ini yaitu dapat berfungsi untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan mengenai suatu objek yang diteliti. Analisis deskriptif ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian. Teknik statistika deskriptif yaitu hanya untuk memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik referensi yang di generalisasikan untuk data yang lebih besar lagi atau populasi.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan yaitu untuk memenuhi uji normalitas data pada model regresi linear berganda. Proses untuk pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan uji regresi linear berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengujian asumsi klasik mempunyai kontak yang menguji dengan regresi linear berganda.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov Smirnov Test dengan menggunakan program SPSS. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan:

1. Jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0.05$ maka data normal
2. Jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0.05$ maka data tidak normal

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dapat dinamakan problem multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila terbukti adanya multikolinearitas sebaiknya untuk salah satu dari variabel independen yang ada harus dikeluarkan dari model, dan pembuatan regresi dapat diulang kembali. Gejala adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan pearson correlation dan tolerance value serta Variance Inflation Factor (VIF). Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu:

1. Jika $VIF > 10$ maka Hipotesis ditolak (adanya multikolinearitas)
2. Jika $VIF < 10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)
3. Jika $Tolerance > 0.10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)
4. Jika $Tolerance < 0.10$ maka Hipotesis ditolak (ada multikolinearitas)

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang Homoskedastisitas atau tidak ada Heteroskedastisitas. Mengenai perolehan hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut ditunjukkan dengan kriteria:

1. Signifikansi (2-tailed) > 0.05 Tidak ada Heteroskedastisitas
2. Signifikansi (2-tailed) < 0.05 Ada Heteroskedastisitas

Atau dapat juga diketahui dari gambar Scatterplot di mana titik-titik data harus menyebar, apabila membentuk pola menumpuk berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016) Regresi Linear Berganda yaitu merupakan suatu metode statistika umum yang dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Untuk persamaan Regresi Linear Berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 β_2 = Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
 β_3 = Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 β_4 = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Internal

- X1 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 X2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
 X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
 X4 = Sistem Pengendalian Internal
 e = error

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis adalah suatu pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan kasus tertentu serta merupakan suatu anggapan sementara yang perlu untuk diuji suatu kebenarannya dalam suatu penelitian.

3.7.5.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Koefisien Regresi Parsial atau Uji t yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan table t sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Kriteria untuk pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh signifikan
 2. $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh secara signifikan
 3. $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan
- Atau
1. Signifikansi < 0.05 secara parsial berpengaruh secara signifikan
 2. Signifikansi > 0.05 secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan

3.7.5.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji Koefisien Regresi secara Simultan atau Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikan 0.05 atau $\alpha = 5\%$. pengambilan keputusan berdasarkan dari kriteria sebagai berikut:

1. $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
 2. $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan
- Atau
1. Signifikansi > 0.05 maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

2. Signifikansi < 0.05 maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan

3.7.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai untuk koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1.

1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersumber dari data primer yang dilakukan pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020-2021 yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi populasi sekaligus sampel, dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

Secara astronomis, Kabupaten Cianjur terletak antara 1060 42' - 1070 25' Bujur Timur dan 60 21' - 70 25' Lintang Selatan dengan ketinggian 7-2.962 mdpl. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Cianjur memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta; Selatan – Samudra Hindia; Barat – Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kab.Garut. Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan dan 360 Desa/Kelurahan.

4.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dalam Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021 mempunyai tujuan: “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan profesional untuk tercapainya pemerintahan yang baik.” Sedangkan yang menjadi sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur adalah: “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penetapan anggaran yang tepat waktu.”

4.1.2 Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan. Sedangkan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan memiliki 75 orang pegawai yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub-bagian, 9 Kepala Sub-bidang, serta 58 Staff terbagi di setiap Sub-bagian dan Sub-bidang.

a. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran Badan;
3. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang keuangan;
4. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
8. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan badan sesuai dengan ketentuan dan /atau perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Badan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, sekretariat membawahi :

a) Sub-bagian Perencanaan

Sub-bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-Bagian Perencanaan;
2. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan;
3. Penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
4. Penyiapan dan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin);
5. Penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan Badan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
7. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
8. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bagian Perencanaan;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bagian Perencanaan; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub-bagian Keuangan

Sub-bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bagian Keuangan;
2. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung;
3. Pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;
4. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
5. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
6. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
7. Penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan;
9. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bagian Keuangan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bagian Keuangan; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub-bagian Umum dan Kepegawaian

Sub-bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Badan;
4. Pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
5. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;
6. Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kependidikan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian;
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor di lingkungan Badan;
8. Penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi Badan;
10. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Badan;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bagian Umum dan Kepegawaian; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Anggaran;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
3. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Anggaran;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Anggaran; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi:

a) Sub-bidang Belanja Langsung

Sub-bidang Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja langsung. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Belanja Langsung mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Belanja Langsung;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan di bidang teknis perencanaan penganggaran belanja langsung;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Badan di bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum Pemerintah Daerah sebagai bahan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah;
5. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan/pedoman penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan rencana penganggaran belanja langsung sebagai bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
7. Pelaksanaan evaluasi rancangan rencana penganggaran belanja langsung;
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi rencana penganggaran belanja langsung;

9. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan data sebagai bahan penyusunan dan penerbitan surat pencairan dana.
 10. Pelaksanaan penerbitan dan penyiapan dokumen surat penyediaan dana.
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Belanja Langsung;
 12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Belanja Langsung; dan
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta failitas pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan di bidang teknis perencanaan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis penganggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum Pemerintah Daerah sebagai bahan penganggaran dan pelaksanaan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
5. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan/pedoman penganggaran dan pelaksanaan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan belanja tidak langsung sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi rancangan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi belanja tidak langsung dan pembiayaan;
9. Pelaksanaan pengelolaan belanja hibah, bansos, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada partai politik;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan penganggaran dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan di bidang teknis perencanaan penganggaran Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis perencanaan penganggaran Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum Pemerintah Daerah tentang Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tentang penganggaran Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai bahan penyusunan rancangan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Penyusunan rencana dan evaluasi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengelolaan data dan informasi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta pelaksanaan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perbendaharaan;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang verifikasi belanja dan pembiayaan, pengelolaan kas, dan penatausahaan keuangan;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di bidang verifikasi belanja dan pembiayaan, pengelolaan kas, dan penatausahaan keuangan;
4. Perumusan kebijakan pelaksanaan penyerapan anggaran, penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pengelolaan investasi;
5. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
7. Penyusunan kebutuhan gaji pegawai, dan pengendalian pengeluaran kas umum daerah;
8. Penyelenggaraan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Perbendaharaan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perbendaharaan; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

a) Sub-bidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan

Sub-bidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan verifikasi belanja dan pembiayaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan;
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang verifikasi belanja dan pembiayaan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi belanja dan pembiayaan;

4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Badan dibidang verifikasi belanja dan pembiayaan;
 5. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan administrasi belanja sebagai bahan penyusunan rancangan APBD;
 6. Verifikasi surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran;
 7. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 8. Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu belanja pada APBD;
 9. Penyusunan bahan pembinaan belanja bagi para pengelola keuangan daerah;
 10. Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran;
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbidang Subbidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan;
 12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan; dan
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sub-bidang Pengelolaan Kas

Sub-bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pencatatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pengelolaan gaji pegawai negeri sipil daerah beserta tunjangannya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas;
2. Pencatatan pendapatan, pengeluaran dan penyimpanan uang daerah;
3. Melaksanakan rekonsialisasi RKUD;
4. Memantau dan mengatur pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Pengelolaan gaji pegawai negeri sipil daerah beserta tunjangannya, dan potongan pihak ketiga yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah lainnya.
6. Penyiapan bahan penyusunan teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka penempatan uang daerah;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala sesuai kebutuhan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbidang Pengelolaan Kas;

10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub-bidang Penatausahaan Keuangan

Sub-bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Penatausahaan Keuangan;
2. Penyusunan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang penatausahaan keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan administrasi penatausahaan keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala;
5. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran diluar APBD yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah secara berkala;
6. Penyusunan bahan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan bagi para pengelola keuangan daerah;
7. Penyusunan bahan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan bagi para pengelola keuangan daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Penatausahaan Keuangan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Penatausahaan Keuangan; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang akuntansi dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
3. Penyusunan kebijakan teknis Badan dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
5. Pengkoordinasian penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah;
8. Pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas bidang akuntansi dan aset daerah;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

a) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis badan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
3. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis badan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan konsolidasi laporan realisasi semesteran dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan;
7. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan laporan keuangan tahunan;
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Melakukan pengelolaan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah

Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengamanan dan penatausahaan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis badan di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta penatausahaan aset daerah;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis badan di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan aset daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan aset daerah;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan rencana perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan aset daerah;
6. Penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan pengadaan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penyiapan bahan penetapan penggunaan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan penatausahaan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pengolahan data dan informasi terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana strategis Badan di bidang pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Badan di bidang pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan rencana pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah;
6. Pelaksanaan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengelolaan data dan informasi terkait pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset daerah;
8. Pengelolaan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner berupa *link google form* dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Proses penyebaran hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021 – 20 Juni 2021. Dari 75 total pegawai keseluruhan, kuesioner diisi oleh 54 pegawai, tidak terdapat kuesioner yang cacat yang diolah oleh penulis. Adapun rician penyebaran kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Pengumpulan Kuesioner Responden

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	Keseluruhan Pegawai	75	100%
2.	Pegawai yang mengisi kuesioner	54	72%
3.	Kuesioner yang dapat diolah	54	72%

Sumber : Data Primer, 2021

Responden terdiri dari kepala badan, kepala sub-bagian, kepala sub-bidang dan staff yang menjadi analisis penelitian. Selanjutnya, sebanyak 54 kuesioner yang diisi oleh responden, dan dapat dipergunakan dalam pengolahan data. Adapun demografi responden adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 54 responden diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	25	46,3	46,3	46,3
	Perempuan	29	53,7	53,7	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan sebanyak 29 orang dengan tingkat persentase sebesar 53,7% lebih besar dibandingkan jumlah responden laki-laki yang berjumlah 25 orang dengan tingkat persentase sebesar 46,3% dari jumlah keseluruhan responden.

b. Jabatan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 54 responden diperoleh data tentang jabatan responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jabatan ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Jabatan Responden

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kabid	3	5,6	5,6	5,6
	Kasubag	3	5,6	5,6	11,1
	Kasubid	8	14,8	14,8	25,9
	Kepala Badan	1	1,9	1,9	27,8
	Staff	39	72,2	72,2	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden adalah staff yaitu sebanyak 39 orang dengan tingkat persentase 72,2%, kepala bidang dan kepala sub-bagian masing-masing sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 5,6%, kepala sub-bidang sebanyak 8 orang dengan tingkat persentase 14,8%, dan kepala dinas 1 orang dengan tingkat persentase 1,9%.

c. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 54 responden diperoleh data tentang pendidikan terakhir responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma/D3	3	5,6	5,6	5,6
	Magister/S2	10	18,5	18,5	24,1
	Sarjana/S1	41	75,9	75,9	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden berpendidikan terakhir Sarjana/S1 yaitu sebanyak 41 orang dengan tingkat persentase 75,9%, berpendidikan Diploma/D3 sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase 5,6%, dan berpendidikan Magister/S2 sebanyak 10 orang dengan tingkat persentase 18,5%.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2) dan variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

5 = Sangat Setuju (SS) 2 = Kurang Setuju (KS)
 4 = Setuju (S) 1 = Tidak Setuju (TS)
 3 = Netral (N)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dalam kuesioner yaitu :

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Jawaban Responden		TS	KS	N	S	SS	Total	Rata-Rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	0	1	31	22	54	4,39
	Skor	0	0	3	124	110	237	
	%	0	0	1,9	57,4	40,7	100	
Pernyataan 2	F	0	0	2	38	14	54	4,22
	Skor	0	0	6	152	70	228	
	%	0	0	3,7	70,4	25,9	100	
Pernyataan 3	F	0	1	6	33	14	54	4,11
	Skor	0	2	18	132	70	222	
	%	0	1,9	11,1	61,1	25,9	100	
Pernyataan 4	F	0	0	1	33	20	54	4,35
	Skor	0	0	3	132	100	235	
	%	0	0	1,9	61,1	37,0	100	
Pernyataan 5	F	0	0	2	34	18	54	4,30
	Skor	0	0	6	136	90	232	
	%	0	0	3,7	63,0	33,3	100	
Pernyataan 6	F	0	0	3	38	13	54	4,19
	Skor	0	0	9	152	65	226	
	%	0	0	5,6	70,4	24,0	100	
Pernyataan 7	F	0	1	2	38	13	54	4,17
	Skor	0	2	6	152	65	225	
	%	0	1,9	3,7	70,4	24,0	100	
Pernyataan 8	F	0	0	0	39	15	54	4,28
	Skor	0	0	0	156	75	231	
	%	0	0	0	72,2	27,8	100	
Pernyataan 9	F	0	1	5	35	13	54	4,11
	Skor	0	2	15	140	65	222	
	%	0	1,9	9,3	64,8	24,0	100	

Pernyataan 10	F	0	0	2	36	16	54	4,26
	Skor	0	0	6	144	80	230	
	%	0	0	3,7	66,7	29,6	100	
Pernyataan 11	F	0	0	1	35	18	54	4,31
	Skor	0	0	3	140	90	233	
	%	0	0	1,9	64,8	33,3	100	
Pernyataan 12	F	0	0	1	31	22	54	4,39
	Skor	0	0	3	124	110	237	
	%	0	0	1,9	57,4	40,7	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4,26

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penilaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari hasil kuesioner dengan *link google form* yang diisi oleh pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Cianjur. Dari segi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat indikator pencatatan memiliki 5 (lima) indeks pernyataan kuesioner, penggolongan dan pengkhtisaran memiliki 3 (tiga) indeks pernyataan kuesioner, dan pelaporan memiliki 4 (empat) indeks pernyataan kuesioner.

Persepsi responden terhadap indikator mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 4,26 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden menganggap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur cukup baik secara keseluruhan dari segi indikator pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dan pelaporan. Pada variabel ini, nilai indeks tertinggi sebesar 4,39 mengenai indikator pencatatan dengan item pernyataan sistem pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dan indikator pelaporan dengan item pernyataan pelaporan keuangan dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.

Indeks terendah yaitu sebesar 4,11 mengenai indikator pencatatan dengan item pernyataan pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada dan indikator pelaporan dengan item pernyataan pelaporan yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini mengartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus meningkatkan ketelitian dalam proses penginputan data.

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2) dan variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5 = Sangat Setuju (SS) | 3 = Netral (N) | 1 = Tidak Setuju (TS) |
| 4 = Setuju (S) | 2 = Kurang Setuju (KS) | |

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengelolaan keuangan daerah (X2) yang terdapat dalam kuesioner yaitu :

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Jawaban Responden		TS	KS	N	S	SS	Total	Rata-Rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	1	3	40	10	54	4,09
	Skor	0	2	9	160	50	221	
	%	0	1,9	5,6	74,0	18,5	100	
Pernyataan 2	F	0	4	13	32	5	54	3,70
	Skor	0	8	39	128	25	200	
	%	0	7,4	24,0	59,3	9,3	100	
Pernyataan 3	F	0	5	17	26	6	54	3,61
	Skor	0	10	51	104	30	195	
	%	0	9,3	31,5	48,1	11,1	100	
Pernyataan 4	F	0	8	19	19	8	54	3,50
	Skor	0	16	57	76	40	189	
	%	0	14,8	35,2	35,2	14,8	100	
Pernyataan 5	F	0	8	21	16	9	54	3,48
	Skor	0	16	63	64	45	188	
	%	0	14,8	38,9	29,6	16,7	100	
Pernyataan 6	F	0	11	15	22	6	54	3,43
	Skor	0	22	45	88	30	185	
	%	0	20,4	27,8	40,7	11,1	100	
Pernyataan 7	F	0	0	4	39	11	54	4,13
	Skor	0	0	12	156	55	223	
	%	0	0	7,4	72,2	20,4	100	
Pernyataan 8	F	0	0	11	31	12	54	4,02
	Skor	0	0	33	124	60	217	
	%	0	0	20,4	57,4	22,2	100	
Pernyataan 9	F	0	0	4	40	10	54	4,11
	Skor	0	0	12	160	50	222	
	%	0	0	7,4	74,1	18,5	100	
Pernyataan 10	F	0	2	11	30	11	54	3,93
	Skor	0	4	33	120	55	212	
	%	0	3,7	20,4	55,6	20,4	100,1	
Rata-Rata Keseluruhan								3,80

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penilaian pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari hasil kuesioner dengan *link google form* yang diisi oleh pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Cianjur. Dari segi pengelolaan keuangan daerah terdapat indikator akuntabilitas memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner, *value for money* memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner, kejujuran dalam mengelola keuangan publik memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner, transparansi memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner dan pengendalian memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner.

Persepsi responden terhadap indikator mengenai pengelolaan keuangan daerah (X2) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 3,80 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden menganggap pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur cukup baik secara keseluruhan dari segi indikator akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian. Pada variabel ini, nilai indeks tertinggi sebesar 4,13 mengenai indikator transparansi dengan item pernyataan instansi terbuka dalam pengelolaan keuangan terhadap elemen masyarakat.

Indeks terendah yaitu sebesar 3,43 mengenai indikator kejujuran dalam mengelola keuangan publik dengan item pernyataan instansi jujur dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini para pegawai dan pimpinan harus melakukan pelatihan serta evaluasi dalam pengelolaan keuangannya.

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2) dan variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

5 = Sangat Setuju (SS)	2 = Kurang Setuju (KS)
4 = Setuju (S)	1 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)	

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan kualitas laporan keuangan daerah (Y) yang terdapat dalam kuesioner yaitu :

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Jawaban Responden		TS	KS	N	S	SS	Total	Rata-Rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	0	2	42	10	54	4,15
	Skor	0	0	6	168	50	224	
	%	0	0	3,7	77,8	18,5	100	
Pernyataan 2	F	0	3	5	37	9	54	3,96
	Skor	0	6	15	148	45	214	
	%	0	5,6	9,3	68,4	16,7	100	
Pernyataan 3	F	0	0	8	36	10	54	4,04
	Skor	0	0	24	144	50	218	
	%	0	0	14,8	66,7	18,5	100	
Pernyataan 4	F	0	1	7	38	8	54	3,98
	Skor	0	2	21	152	40	215	
	%	0	1,9	13,0	70,3	14,8	100	
Pernyataan 5	F	0	0	0	45	9	54	4,17
	Skor	0	0	0	180	45	225	
	%	0	0	0	83,3	16,7	100	
Pernyataan 6	F	0	0	12	39	3	54	3,83
	Skor	0	0	36	156	15	207	
	%	0	0	22,2	72,2	5,6	100	
Pernyataan 7	F	0	0	7	42	5	54	3,96
	Skor	0	0	21	168	25	214	
	%	0	0	13,0	77,7	9,3	100	
Pernyataan 8	F	0	0	7	39	8	54	4,02
	Skor	0	0	21	156	40	217	
	%	0	0	13,0	72,2	14,8	100	
Pernyataan 9	F	0	0	9	29	16	54	4,13
	Skor	0	0	27	116	80	223	
	%	0	0	16,7	53,7	29,6	100	
Pernyataan 10	F	0	2	9	33	10	54	3,94
	Skor	0	4	27	132	50	213	
	%	0	3,7	16,7	61,1	18,5	100	
Pernyataan 11	F	0	0	2	39	13	54	4,20
	Skor	0	0	6	156	65	227	
	%	0	0	3,7	72,2	24,1	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4,03

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penilaian pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari hasil kuesioner dengan *link google form* yang diisi oleh pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Cianjur. Dari segi kualitas laporan keuangan daerah terdapat indikator relevan memiliki 4 (empat) indeks pernyataan kuesioner, andal memiliki 3 (tiga) indeks pernyataan kuesioner, dapat dibandingkan memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner, dan dapat dipahami memiliki 2 (dua) indeks pernyataan kuesioner.

Persepsi responden terhadap indikator mengenai kualitas laporan keuangan daerah (Y) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 4,03 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden menganggap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur cukup baik secara keseluruhan dari segi indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pada variabel ini, nilai indeks tertinggi sebesar 4,20 mengenai indikator dapat dipahami dengan item pernyataan laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.

Indeks terendah yaitu sebesar 3,83 mengenai indikator andal dengan item pernyataan informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda. Dengan hal itu mengartikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur apabila diuji oleh pihak yang berbeda tentu akan mewujudkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas ini yaitu dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid yaitu apabila pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner yang berkaitan.

Kriteria dalam pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan atau pernyataan adalah nilai dari Corrected Item Total Correlation atau nilai dari r hitung harus berada di atas nilai r tabel. Apabila nilai dari r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item dari pertanyaan atau pernyataan yang lain daripada dengan variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Secara singkat nya adalah sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

No.	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1.	Pernyataan 1	0,737	0,268	Valid
2.	Pernyataan 2	0,751	0,268	Valid
3.	Pernyataan 3	0,594	0,268	Valid
4.	Pernyataan 4	0,634	0,268	Valid
5.	Pernyataan 5	0,786	0,268	Valid
6.	Pernyataan 6	0,636	0,268	Valid
7.	Pernyataan 7	0,737	0,268	Valid
8.	Pernyataan 8	0,696	0,268	Valid
9.	Pernyataan 9	0,694	0,268	Valid
10.	Pernyataan 10	0,731	0,268	Valid
11.	Pernyataan 11	0,763	0,268	Valid
12.	Pernyataan 12	0,651	0,268	Valid

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

No.	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1.	Pernyataan 1	0,597	0,268	Valid
2.	Pernyataan 2	0,813	0,268	Valid
3.	Pernyataan 3	0,783	0,268	Valid
4.	Pernyataan 4	0,883	0,268	Valid
5.	Pernyataan 5	0,911	0,268	Valid
6.	Pernyataan 6	0,846	0,268	Valid
7.	Pernyataan 7	0,519	0,268	Valid
8.	Pernyataan 8	0,644	0,268	Valid
9.	Pernyataan 9	0,666	0,268	Valid
10.	Pernyataan 10	0,670	0,268	Valid

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No.	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1.	Pernyataan 1	0,514	0,268	Valid
2.	Pernyataan 2	0,541	0,268	Valid
3.	Pernyataan 3	0,718	0,268	Valid
4.	Pernyataan 4	0,445	0,268	Valid
5.	Pernyataan 5	0,643	0,268	Valid
6.	Pernyataan 6	0,460	0,268	Valid
7.	Pernyataan 7	0,630	0,268	Valid
8.	Pernyataan 8	0,663	0,268	Valid
9.	Pernyataan 9	0,655	0,268	Valid
10.	Pernyataan 10	0,639	0,268	Valid
11.	Pernyataan 11	0,665	0,268	Valid

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel kualitas laporan keuangan daerah memperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid sehingga pernyataan-pernyataan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu merupakan indeks dalam mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang memberikan suatu hasil yang konsisten. Apabila semakin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka akan semakin reliabel alat pengukur. Besar kecilnya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indeks korelasi.

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika Cronbach's Alpha ≥ 0.60 maka alat ukur bersifat reliabel.
2. Jika Cronbach's Alpha < 0.60 maka alat ukur bersifat tidak reliabel.

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,929	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,931	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,877	Reliabel

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel penelitian yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner penelitian reliabel sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov Smirnov Test dengan menggunakan program SPSS. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan:

1. Jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0.05$ maka data normal
2. Jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0.05$ maka data tidak normal

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,19806734
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,076
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,079. Dikarenakan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari tingkat sigifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,079 $>$ 0,05) maka berarti data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dapat dinamakan problem multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila terbukti adanya multikolinearitas sebaiknya untuk salah satu dari variabel independen yang ada harus dikeluarkan dari model, dan pembuatan regresi dapat diulang kembali. Gejala adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan pearson correlation dan tolerance value serta Variance Inflation Factor (VIF). Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu:

1. Jika $VIF > 10$ maka Hipotesis ditolak (adanya multikolinearitas)
2. Jika $VIF < 10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)
3. Jika Tolerance > 0.10 maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)
4. Jika Tolerance < 0.10 maka Hipotesis ditolak (ada multikolinearitas)

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,889	1,125
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,889	1,125

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

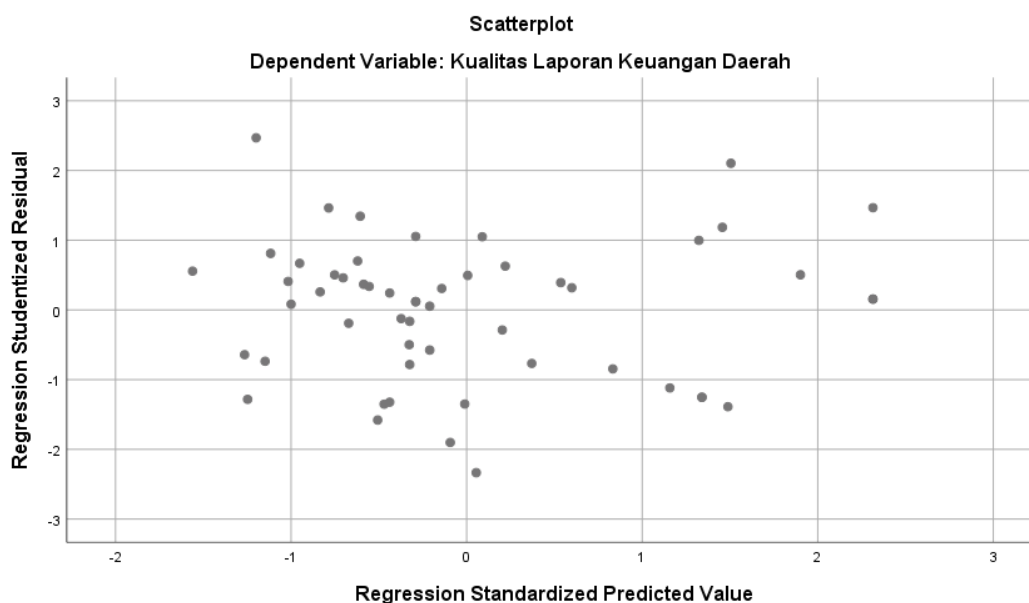
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,889 dimana hal tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,125 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengandung multikolinearitas, artinya pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang Homoskedastisitas atau tidak ada Heteroskedastisitas. Mengenai perolehan hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut ditunjukkan dengan kriteria:

1. Signifikansi (2-tailed) > 0.05 Tidak ada Heteroskedastisitas
2. Signifikansi (2-tailed) < 0.05 Ada Heteroskedastisitas

Atau dapat juga diketahui dari gambar Scatterplot di mana titik-titik data harus menyebar, apabila membentuk pola menumpuk berarti terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Gambar 4.1 Diagram Scatterplot

Berdasarkan diagram di atas, titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti model regresi layak digunakan dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu merupakan suatu metode statistika umum yang dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,988	4,904		3,260	,002
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,393	,097	,462	4,044	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,219	,080	,312	2,732	,009

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Dari tabel tersebut diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 15,988 + 0,393X_1 + 0,219X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

- Konstanta dan koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas laporan keuangan daerah semakin baik seiring dengan bertambah kuat sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerahnya.
- Koefisien regresi sebesar 0,393 untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X_1 sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,393% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap).
- Koefisien regresi sebesar 0,219 untuk variabel pengelolaan keuangan daerah (X_2), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X_2 sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,219% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap).

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Koefisien Regresi Parsial atau Uji t yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan table t sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,988	4,904		3,260	,002
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,393	,097	,462	4,044	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,219	,080	,312	2,732	,009

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Hasil penelitian koefisien regresi nilai t signifikansi secara parsial sebagai berikut :

- a. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} 4,044 > t_{tabel} 1,673$ atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} 2,732 > t_{tabel} 1,673$ atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.3.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji Koefisien Regresi secara Simultan atau Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikan 0.05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_o , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima dan menolak H_a .

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	372,769	2	186,384	17,536	,000 ^b
	Residual	542,065	51	10,629		
	Total	914,833	53			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah						

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $17,536 > F_{tabel}$ sebesar 3,18 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,407	,384	3,260
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah				

Sumber : Data Primer, data diolah penulis dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,638 atau 63,8% hal ini berarti kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 63,8% dan sisanya 36,2% dipengaruhi oleh indikator dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil pengujian dalam penelitian ini yang dilakukan pada pegawai yang bekerja di BPKAD Kabupaten Cianjur, bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian	Hasil pengujian		Hipotesis
	Uji t	Uji F	
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	4,044 > 1,673	-	H1 Diterima
Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	2,732 > 1,673	-	H2 Diterima
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	-	17,536 > 3,18	H3 Diterima

Sumber: Data diolah penulis, 2021

4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis pertama (H1) yang diajukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji t penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 4,044 atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,044 > 1,673$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah atau dengan kata lain jika pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan meningkat, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut. Namun, mengenai indikator pencatatan dengan item pernyataan pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada dan indikator pelaporan dengan item pernyataan pelaporan yang dilakukan

sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden item pernyataan tersebut memiliki nilai skor rata-rata terendah sebesar 4,11 dimana nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata keseluruhan yaitu 4,26. Hal ini dapat dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu temuan audit mengenai beban hibah sarana dan prasarana SMP swasta di Kabupaten Cianjur tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan dilihat dari kualitas laporan keuangan tersebut meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan penggolongan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Defitri, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2018) dan Lutfiyanti (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak sejalan dengan penelitian Indriyani dan Widiastuti (2020) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis kedua (H2) yang diajukan yaitu pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji t pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,732 atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,732 > 1,673$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($0,009 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah atau dengan kata lain jika akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian meningkat, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut. Namun, mengenai indikator

kejujuran dalam mengelola keuangan publik dengan item pernyataan instansi jujur dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan masih belum maksimal pelaksanaannya dikarenakan berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden item pernyataan tersebut memiliki nilai skor rata-rata terendah sebesar 3,43 dimana nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata keseluruhan yaitu 3,80. Hal ini dapat dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu temuan audit mengenai beban hibah sarana dan prasarana SMP swasta di Kabupaten Cianjur tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et., al. (2014) dan Sholikhah et., al. (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil tersebut memperkuat hipotesis ketiga (H3) yang diajukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil uji F penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai F hitung sebesar 17,536 atau F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($17,536 > 3,18$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur cukup baik dengan indikator pengukuran yang digunakan pada setiap variabel. Namun, mengenai indikator andal dengan item pernyataan informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda perlu ditingkatkan secara optimal dikarenakan berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden item pernyataan tersebut memiliki nilai skor rata-rata terendah sebesar 3,83 dimana nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata keseluruhan yaitu 4,03. Hal ini dapat dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2018 yaitu temuan audit mengenai beban hibah sarana dan prasarana SMP swasta di Kabupaten Cianjur tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020-2021 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020-2021. Namun mengenai indikator pencatatan dalam hal pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada dan indikator pelaporan dalam hal pelaporan yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020-2021. Namun mengenai indikator kejujuran dalam mengelola keuangan publik perihal instansi jujur dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan masih harus ditingkatkan lagi.
3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020-2021.

5.2 Saran

- Untuk kegunaan akademik/teoritik penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi keuangan, bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya melakukan penelitian dengan indikator penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah saja tetapi menambahkan dengan indikator lain yaitu pendidikan dan pelatihan serta komitmen pimpinan daerah sehingga hasil penelitian yang di dapat lebih akurat.
- Untuk kegunaan praktik yaitu bagaimana hasil penelitian ini dapat dipakai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur. Dalam rangka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah perlu dilakukan DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) kepada staff BPKAD Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal ketelitian dalam proses penginputan data dan menggunakan sistem pengendalian pemerintahan untuk pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kejujuran dalam mengelola keuangan publik serta melakukan evaluasi pengelolaan keuangan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020. Tersedia di: <https://www.bpk.go.id/ihps> [Diakses pada 19 Maret 2021].
- Chabib, S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Bandung: Fokus Media.
- Cianjur Ekspres. 2021. Cianjur Hanya Dapat WDP Dampak Adanya OTT Terhadap Bupati Terkait DAK. *Cianjurekspres.net*, hal. 1, kol. 1-5. Tersedia di: <https://www.cianjurekspres.net/cianjur-hanya-dapat-wdp/> [Diakses pada 20 Maret 2021].
- Darmawan, N.A.S. et al., (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, [online] Volume 2, No. 1, Tahun 2014. Tersedia di: <http://ejournal.undiksha.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
- Defitri, S.Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Ekonomi*, [online] Volume 22 (1), 53-72, 2014. Tersedia di: <http://www.neliti.com> [Diakses pada 29 Maret 2021].
- Defitri, S.Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, [online] Volume 3(1) Februari 2018, p. 64-75. Tersedia di: <http://ejournal.ildikti10.id> [Diakses pada 29 September 2020].
- Defitri, S.Y. et al., (2016). The Effect Knowledge of Budget and Job Relevant Information on Asymmetry Information. *Jurnal European Academic Reseach*, [online] Volume IV(4) July 2016. Tersedia di: <http://repository.upiypk.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
- Erlina, dan Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Medan : Brama Ardian.
- Gelinas., et al. (2016). *Accounting Information System*. 10 Edition. South-Western. USA.
- Halim, Abdul et al., (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hanifa, L. et al., (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, [online] Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN 2502-5171. Tersedia di: <http://ojs.uho.ac.id> [Diakses pada 17 Maret 2021].

- Harefa, T. (2014). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). *Jurnal Akuntansi*, [online]. Tersedia di: <http://elib.unikom.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
- Hery. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Intergrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrayani, K.D. dan Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, [online] Volume 4, No. 1, hal. 1-16, Juli 2020. Tersedia di: <http://journal.umy.ac.id> [Diakses pada 19 Maret 2021].
- Lutfiyanti, A.R. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang)*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mokoginta, N., et al. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, [online] Volume 12(2), 2017, p. 874-890. Tersedia di: <http://ejournal.unsrat.ac.id> [Diakses pada 29 September 2020].
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan, D. et al.,. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patra, A.D.A., et al. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 2(1) Februari 2015, p. 1-9. Tersedia di: <http://journal.stiem.ac.id> [Diakses pada 29 September 2020].
- Pratama, A.Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, [online] Volume 28, Nomor 1, Februari 2015. Tersedia di: <http://journal.um.ac.id> [Diakses pada 29 Maret 2021].
- Ratifah, I. dan Ridwan M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, [online] Volume 11, No.1, Juni 2012, Hal 29-39, ISSN 1411-514X. Tersedia di: <http://digilib.mercubuana.ac.id> [Diakses pada 30 Maret 2021].

- Sari, G.I. dan Fadli. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 7, No. 3, Oktober 2017 ISSN 2303-0356, hal. 17-34. Tersedia di: <http://ejournal.unib.ac.id> [Diakses pada 18 Maret 2021].
- Setyowati, L. Et al.,. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, [online] Volume 20, No. 2, Th. 2016: hal. 179-191. Tersedia di: <http://ojs.uajy.ac.id> [Diakses pada 18 Maret 2021].
- Sholikah, R.N. et al.,. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, [online] Volume 12, Edisi Khusus April 2016: 168-175. Tersedia di: <http://ejournal.unisri.ac.id> [Diakses pada 17 Maret 2021].
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2016 tentang *Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvira Nur Fahirah
Alamat : Kp. Malingping, RT 04 RW 07,
Desa Cimacan, Kecamatan
Cipanas, Kabupaten Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 07 November 1999
Agama : Islam
Nomor *Handphone* : 0815-7259-2475
Email : nurfahirahalvira@gmail.com
Pendidikan :

- Sekolah Dasar (SD) Negeri Jayagiri
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cipanas
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukaresmi (2015-2017)
- Universitas Pakuan Bogor (2017-2021)



Bogor, 13 Juli 2021

Peneliti,

(Alvira Nur Fahirah)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset/Magang



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 360 /WD.1/FEB-UP/IV/2021 12 April 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset/Magang

Kepada : Yth. Pimpinan/Kepala
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN CIANJUR
Jl.KH.Abdullah Bin Muh No.15 Sawah Gede Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur,Jawa Barat 43212

Dengan hormat
Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah mata kuliah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk mencari data/riset/magang ke perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Alvira Nur Fahirah
NPM : 0221 17 183
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


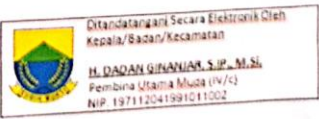


a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Chaidir, SE., MM.

Tembusan :
1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Praktik Kerja

	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 26 Telp./Fax. (0263) 261735 – CIANJUR 43212	
Cianjur 28 Mei 2021		
Nomor	: 070.1/INTEL-POA.325/Kesbangpol	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
Hal	: Rekomendasi Praktik Kerja	di-
TEMPAT		
Dasar :		
1. Menunjuk Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;		
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;		
3. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Perubahan Terakhir Nomor: 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;		
4. Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cianjur;		
5. Surat dari Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Nomor : 360/WD.1/FEB-UP/IV/2021, Tanggal : 12 April 2021, Hal : Permohonan Izin Praktik Kerja		
Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Cianjur dengan ini memberikan izin kepada:		
Nama	: Alvira Nur Fahirah	
Alamat	: Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor	
Lokasi	: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur	
Waktu	: 1 Juni 2021 s.d 1 Juli 2021	
Judul Penelitian	: -	
Penanggung Jawab	: Dr. Chaidir, SE., MM.	
Jabatan	: Wakil Dekan	
Nama Lembaga	: Universitas Pakuan	
Catatan	: Hasil Penelitian agar dilaporkan kepada Badan Kesbangpol.	
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
		
Tembusan disampaikan kepada :		
1. Yth. Wakil Dekan Universitas Pakuan ;		
2. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan.		

Lampiran 3. Surat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Cianjur Telp. (0263) 272879 Pst. 101, 102, 104, 106 Fax. 263411		
Cianjur, 02 Juli 2021		
Nomor	: 800/CS1/BPKAD/2021	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Universitas Pakuan Bogor
Lampiran	: -	di
Perihal	: Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	Tempat

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur menerangkan bahwa :


Nama : ALVIRA NUR FAHIRAH
 N.P.M : 0221 17 183
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat : Kampus Universitas Pakuan Bogor
 Jl. Pakuan P.O. Box 452 Bogor

Adalah benar telah melaksanakan Magang / Riset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 untuk penyelesaian skripsi.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala BPKAD Kabupaten Cianjur



R. DEDI SUDRAAT, SE, M.AP
NIP. 196711121996031001
Pembina Utama Muda (IV/c)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Lampiran 4. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner	Referensi Sumber
1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum.	Ordinal	1	2 dan 5
			Pencatatan yang digunakan efektif.	Ordinal	2	
			Relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada.	Ordinal	3	
			Dilaksanakan tanpa kesalahan atau penyimpangan.	Ordinal	4	
			Menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.	Ordinal	5	
		Penggolongan dan Pengikhtisaran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Dilakukan identifikasi/pengklasifikasian.	Ordinal	6	2 dan 5
			Penjurnalan dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.	Ordinal	7	
			Pengklasifikasian transaksi dilaksanakan secara tepat dan benar.	Ordinal	8	
		Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.	Ordinal	9	2 dan 5
			Buku laporan yang dibuat sesuai prosedur yang berlaku.	Ordinal	10	
			Buku laporan yang dibuat telah relevan.	Ordinal	11	
			Dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.	Ordinal	12	

Sumber Referensi :

6. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2010
7. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2019
8. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah, tahun 2013
9. Chabib, S., Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung. Bandung: Fokus Media, tahun 2010
10. Siska Yulia Defitri, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2018)

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner	Referensi Sumber
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.	Ordinal	1	4 dan 5
			Keputusan pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.	Ordinal	2	
		Value for money Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelola keuangan dilaksanakan sesuai standar.	Ordinal	3	4 dan 5
			Dioperasionalkan secara ekonomis, efektif dan efisien.	Ordinal	4	
		Kejujuran dalam mengelola keuangan publik	Memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja.	Ordinal	5	4 dan 5
			Jujur dan dapat dipercaya.	Ordinal	6	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbuka dalam pengelolaan keuangan.	Ordinal	7	4 dan 5
			Responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.	Ordinal	8	
		Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah	Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan.	Ordinal	9	4 dan 5
			Setiap evaluasi kinerja ditindaklanjuti.	Ordinal	10	

Sumber Referensi :

1. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2010
2. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2019
3. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah, tahun 2013
4. Chabib, S., Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung. Bandung: Fokus Media, tahun 2010
5. Siska Yulia Defitri, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2018)

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner	Referensi Sumber
3.	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Relevan	Dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.	Ordinal	1	1, 3, dan 5
			Mampu memprediksi masa yang akan datang.	Ordinal	2	
			Penerbitan laporan keuangan tepat waktu.	Ordinal	3	
			Mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.	Ordinal	4	
		Andal	Menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya.	Ordinal	5	1, 3, dan 5
			Mewujudkan simpulan yang berbeda.	Ordinal	6	
			Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.	Ordinal	7	
		Dapat Dibanding-kan	Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	Ordinal	8	1, 3, dan 5
			Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	Ordinal	9	
		Dapat Dipahami	Informasi dapat dipahami dengan jelas.	Ordinal	10	1, 3, dan 5
			Disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna.	Ordinal	11	

Sumber Referensi :

1. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tahun 2010
2. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2019
3. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah, tahun 2013
4. Chabib, S., Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung. Bandung: Fokus Media, tahun 2010
5. Siska Yulia Defitri, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2018)

Lampiran 5. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN CIANJUR)

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari

BPKAD Kabupaten Cianjur

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)”. Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya.

Terkait hal tersebut di atas, perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, maka semua data dan informasi dijamin kerahasiaannya.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Peneliti

(Alvira Nur Fahirah)

I. Data Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut dan memberi tanda *check list* (√) sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : () Laki-Laki () Perempuan
3. Jabatan :
4. Pendidikan Terakhir : () SMA/ sederajat () Magister/S2
() Diploma/D3 () Lainnya :
.....
() Sarjana/S1

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum menjawab kuesioner, dimohon untuk melengkapi Identitas Responden dengan data diri Bapak/Ibu/Saudara/i pada tempat yang telah disediakan.
2. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda *check list* (√) pada salah satu jawaban yang tersedia. Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut:
 - Sangat Setuju (SS) : Skor 5
 - Setuju (S) : Skor 4
 - Netral (N) : Skor 3
 - Kurang Setuju (KS) : Skor 2
 - Tidak Setuju (TS) : Skor 1
3. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi satu jawaban. Jawablah sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sehingga tidak mengosongkan jawaban.

I. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	N (3)	KS (2)	TS (1)
Pencatatan						
1.	Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.					
2.	Pencatatan keuangan yang digunakan selama ini efektif.					
3.	Pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada.					
4.	Pencatatan keuangan dilaksanakan tanpa kesalahan atau penyimpangan.					
5.	Pencatatan keuangan yang dilaksanakan menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.					
Penggolongan dan Pengikhtisaran						
6.	Dalam melakukan transaksi ekonomi dilakukan identifikasi/ pengklasifikasian.					
7.	Penjurnalan dan postingan yang dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.					
8.	Penggolongan atau pengklasifikasian kegiatan/transaksi ekonomi dilaksanakan secara tepat dan benar.					
Pelaporan						
9.	Pelaporan yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan.					
10.	Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku.					
11.	Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah relevan dengan fakta keuangan yang ada.					
12.	Pelaporan keuangan dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.					

Sumber : Siska Yulia Defitri (2018)

II. Pengelolaan Keuangan Daerah						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	N (3)	KS (2)	TS (1)
Akuntabilitas						
1.	Pengelola keuangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.					
2.	Instansi dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang terkait pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.					
Value for money						
3.	Pengelola keuangan dilaksanakan sesuai standar antara biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan input.					
4.	Pengelolaan keuangan daerah dioperasionalkan secara ekonomis, efektif dan efisien.					
Kejujuran dalam mengelola keuangan publik						
5.	Seluruh elemen dalam instansi memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja.					
6.	Instansi jujur dan dapat dipercaya dalam pelaksanaan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan.					
Transparansi						
7.	Instansi terbuka dalam pengelolaan keuangan terhadap elemen masyarakat.					
8.	Pelaksanaan, pengelolaan, dan pengadaan kegiatan/anggaran responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.					
Pengendalian						
9.	Instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan.					
10.	Setiap evaluasi kinerja pengelolaan keuangan ditindaklanjuti atau diantisipasi langkah kedepannya.					

Sumber : Siska Yulia Defitri (2018)

III. Kualitas Laporan Keuangan						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	N (3)	KS (2)	TS (1)
Relevan						
1.	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.					
2.	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.					
3.	Penyajian / penerbitan laporan keuangan tepat pada waktu sesuai periode akuntansi.					
4.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.					
Andal						
5.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
6.	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda.					
7.	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
Dapat Dibandingkan						
8.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
9.	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.					
Dapat Dipahami						
10.	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.					
11.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.					

Sumber : Siska Yulia Defitri (2018)

40.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
41.	Perempuan	Sarjana/S1	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
42.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
43.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4
44.	Perempuan	Sarjana/S1	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
45.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
47.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	3	4	3	4	2	5	3	4	4	4
48.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
49.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
50.	Laki-Laki	Magister/S2	4	4	2	5	4	4	4	4	4	5	4	4
51.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
53.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
54.	Laki-Laki	Sarjana/S1	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5

40.	Perempuan	Sarjana/S1	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3
41.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3
42.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
43.	Perempuan	Sarjana/S1	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3
44.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
45.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3
46.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
48.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
49.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4
50.	Laki-Laki	Magister/S2	5	4	4	3	3	3	3	4	4	3
51.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3
54.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3

Lampiran 8. Jawaban Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11
1.	Perempuan	Magister/S2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.	Laki-Laki	Diploma/D3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
3.	Laki-Laki	Magister/S2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4
4.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Laki-Laki	Sarjana/S1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.	Laki-Laki	Magister/S2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
9.	Laki-Laki	Magister/S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	Perempuan	Sarjana/S1	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
12.	Perempuan	Sarjana/S1	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
13.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14.	Perempuan	Diploma/D3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15.	Perempuan	Sarjana/S1	5	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
16.	Perempuan	Magister/S2	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
17.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18.	Perempuan	Magister/S2	4	4	5	5	4	3	5	4	3	3	4
19.	Perempuan	Sarjana/S1	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
20.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
21.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	5
22.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
23.	Laki-Laki	Sarjana/S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24.	Laki-Laki	Sarjana/S1	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5
25.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
26.	Perempuan	Magister/S2	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
27.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28.	Perempuan	Sarjana/S1	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
29.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30.	Perempuan	Magister/S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31.	Perempuan	Sarjana/S1	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4
32.	Laki-Laki	Magister/S2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
33.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4
34.	Laki-Laki	Diploma/D3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
35.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
37.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
38.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39.	Perempuan	Sarjana/S1	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5
40.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4

41.	Perempuan	Sarjana/S1	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4
42.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5
44.	Perempuan	Sarjana/S1	4	3	3	5	4	4	4	4	5	2	5
45.	Perempuan	Sarjana/S1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4
47.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3
48.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4
50.	Laki-Laki	Magister/S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
51.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
52.	Perempuan	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54.	Laki-Laki	Sarjana/S1	4	3	3	5	4	4	4	4	5	2	4

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,929	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan 1	46,69	20,107	,737	,922
Pernyataan 2	46,85	20,242	,751	,921
Pernyataan 3	46,96	19,923	,594	,929
Pernyataan 4	46,72	20,619	,634	,925
Pernyataan 5	46,78	19,836	,786	,920
Pernyataan 6	46,89	20,629	,636	,925
Pernyataan 7	46,91	19,784	,737	,921
Pernyataan 8	46,80	20,807	,696	,924
Pernyataan 9	46,96	19,584	,694	,924
Pernyataan 10	46,81	20,191	,731	,922
Pernyataan 11	46,76	20,148	,763	,921
Pernyataan 12	46,69	20,484	,651	,925

RELIABILITY

/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,931	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan 1	33,91	31,029	,597	,930
Pernyataan 2	34,30	28,099	,813	,920
Pernyataan 3	34,39	27,714	,783	,921
Pernyataan 4	34,50	25,877	,883	,915
Pernyataan 5	34,52	25,462	,911	,914
Pernyataan 6	34,57	26,023	,846	,918
Pernyataan 7	33,87	31,775	,519	,933
Pernyataan 8	33,98	29,981	,644	,928
Pernyataan 9	33,89	31,082	,666	,929
Pernyataan 10	34,07	29,089	,670	,927

RELIABILITY

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	54	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	54	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan 1	40,24	15,243	,514	,871
Pernyataan 2	40,43	13,947	,541	,872
Pernyataan 3	40,35	13,817	,718	,857
Pernyataan 4	40,41	14,850	,445	,876
Pernyataan 5	40,22	15,233	,643	,866
Pernyataan 6	40,56	15,195	,460	,874
Pernyataan 7	40,43	14,740	,630	,865
Pernyataan 8	40,37	14,313	,663	,862
Pernyataan 9	40,26	13,554	,655	,862
Pernyataan 10	40,44	13,421	,639	,864
Pernyataan 11	40,19	14,531	,665	,862

Lampiran 10. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT KLKD
/METHOD=ENTER SKAD PKD
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/SAVE RESID.

```

Regression**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 ^a	,407	,384	3,260

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	372,769	2	186,384	17,536	,000 ^b
	Residual	542,065	51	10,629		
	Total	914,833	53			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,988	4,904		3,260	,002		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,393	,097	,462	4,044	,000	,889	1,125
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,219	,080	,312	2,732	,009	,889	1,125

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Coefficient Correlations^a

Model			Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
			Keuangan Daerah	Keuangan Daerah
1	Correlations	Pengelolaan Keuangan Daerah	1,000	-,333
		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-,333	1,000
	Covariances	Pengelolaan Keuangan Daerah	,006	-,003
		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-,003	,009

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions	
					Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah
1	1	2,982	1,000	,00	,00	,00
	2	,014	14,666	,11	,09	1,00
	3	,004	25,864	,89	,91	,00

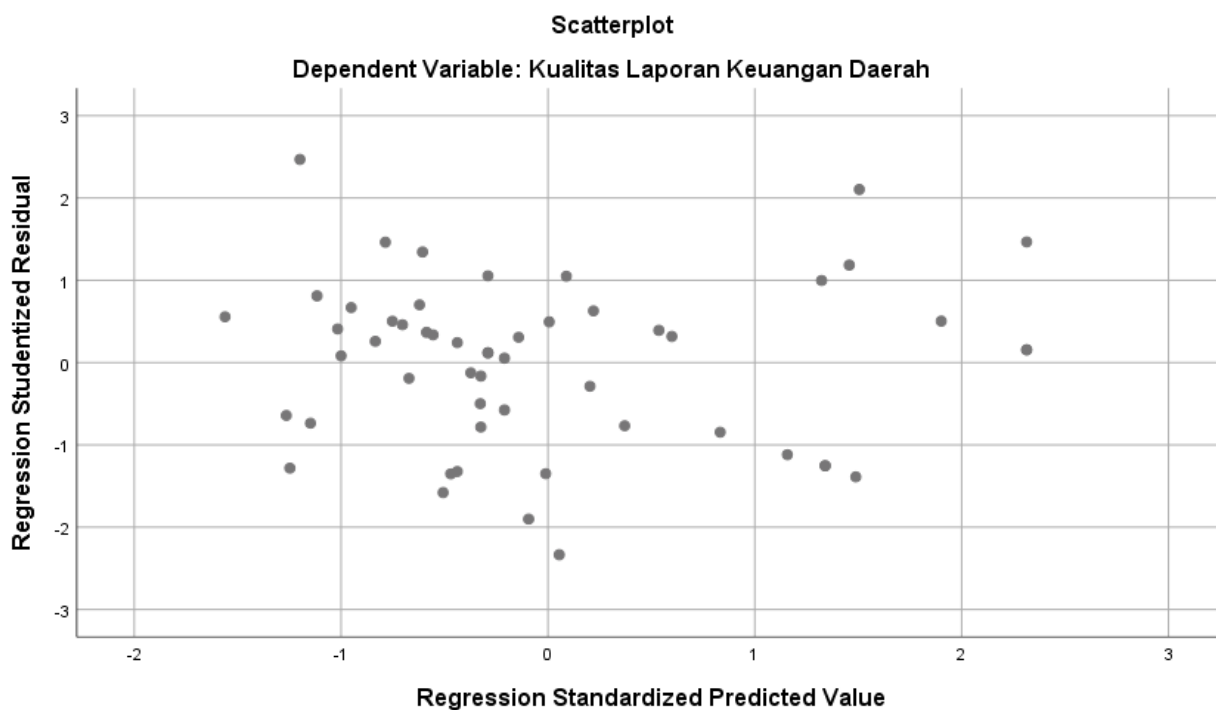
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	40,25	50,53	44,39	2,652	54
Std. Predicted Value	-1,561	2,314	,000	1,000	54
Standard Error of Predicted Value	,444	1,185	,736	,222	54
Adjusted Predicted Value	40,12	50,46	44,39	2,644	54
Residual	-7,534	7,792	,000	3,198	54
Std. Residual	-2,311	2,390	,000	,981	54
Stud. Residual	-2,335	2,468	,000	1,009	54
Deleted Residual	-7,690	8,310	,002	3,389	54
Stud. Deleted Residual	-2,446	2,604	,000	1,029	54
Mahal. Distance	,000	6,022	1,963	1,788	54
Cook's Distance	,000	,135	,020	,029	54
Centered Leverage Value	,000	,114	,037	,034	54

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Charts



NPar Tests

[DataSet1] C:\Users\ASUS X441S\Favorites\Documents\UNIVERSITAS PAKUAN\SEMESTER VII\SKRIPSI\SIDANG SKRIPSI\DATA KUESIONER FINAL.sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,19806734
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,076
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.